

Civic Education Analysis of the DPRD's Role in Encouraging the Tangerang City Government to Explore New Sources of Local Revenue (PAD)

Analisis Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Peran DPRD dalam Mendorong Pemkot Tangerang Menggali Sumber PAD Baru

Aura Salsa Permana

Universitas Pamulang, Indonesia
e-mail: aurasalsapermana@gmail.com

Rosalina Bedo Jogo

Universitas Pamulang, Indonesia
e-mail: rosalinaosin@gmail.com

Maria Seravia Sia

Universitas Pamulang, Indonesia
e-mail: mariaseraviasia@gmail.com

Ajeng Aulia Sasri

Universitas Pamulang, Indonesia
e-mail: ajengauliasasri@gmail.com

Abstract: *This study examines the role of the Regional House of Representatives (DPRD) in encouraging the Tangerang City Government to explore new sources of Local Own-Source Revenue (PAD) through the perspective of Civic Education. The analysis highlights how civic values such as democratic representation, accountability, transparency, rational policy planning, and local government responsibility shape the interaction between the legislative and executive branches in regional financial management. The DPRD's initiative to push for innovative PAD sources reflects its commitment to strengthening fiscal independence and ensuring the sustainability of public services. Through functions of oversight, budgeting, and public representation, the DPRD motivates the local government to conduct research, benchmarking, and identification of potential economic sectors that can enhance revenue. This study concludes that the role of DPRD aligns with the core principles of Civic Education, emphasizing good governance, public participation, and regional autonomy. Strengthening PAD is essential to*

support improved public services, infrastructure development, and long-term regional welfare.

Keywords: *Civic Education, DPRD Governance, Local Revenue.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru melalui perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Analisis ini menyoroti bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan seperti representasi demokratis, akuntabilitas, transparansi, perencanaan kebijakan rasional, dan tanggung jawab pemerintah lokal mewarnai hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. Inisiatif DPRD untuk menuntut pengembangan sumber PAD inovatif menunjukkan komitmen legislatif dalam memperkuat kemandirian fiskal dan menjamin keberlanjutan layanan publik. Melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan representasi publik, DPRD mendorong pemerintah daerah melakukan kajian, *benchmarking*, serta mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran DPRD tersebut selaras dengan prinsip-prinsip utama Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan tata kelola yang baik, partisipasi publik, dan otonomi daerah. Penguatan PAD dipandang penting untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: *DPRD; Pendidikan Kewarganegaraan; Pendapatan Asli Daerah.*

Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman mengenai bagaimana proses pemerintahan daerah dijalankan secara demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.¹ Dalam konteks pemerintahan daerah, lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan penting dalam mewakili aspirasi masyarakat, mengawasi

¹ Paska Sriulina Tarigan, Maretta Ulina Br Ginting, & Donald Vincensius Mario Siregar. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Bangsa Di Era Digital: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1610–1616. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.699>

jalannya pemerintahan, dan memastikan kebijakan publik berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Karena itu, kajian terhadap kerja lembaga legislatif dan eksekutif menjadi relevan dalam memahami sejauh mana nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kota Tangerang sebagai salah satu daerah urban dengan dinamika ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan layanan publik. Untuk menjaga kualitas pelayanan dan keberlanjutan pembangunan daerah, peningkatan kapasitas fiskal menjadi kebutuhan mendesak². Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Namun, tingginya kebutuhan dana pembangunan tidak selalu sejalan dengan kemampuan pendapatan daerah, sehingga diperlukan inovasi dan ekspansi sumber PAD baru sebagai langkah strategis memperkuat keuangan daerah.

DPRD Kota Tangerang memegang peran penting dalam mendorong pemerintah kota agar mampu menggali sumber-sumber PAD baru secara kreatif dan terukur. Dorongan DPRD tidak hanya sekadar arahan teknis, tetapi merupakan refleksi dari fungsi representasi rakyat, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif³. Melalui tekanan politik, rekomendasi kebijakan, serta persetujuan anggaran melalui APBD, DPRD berupaya memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kecukupan fiskal untuk menyediakan layanan publik yang prima. Kondisi ini menarik dikaji dari sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan, karena peran DPRD menunjukkan implementasi nilai demokrasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, peran DPRD dalam mendorong peningkatan PAD baru tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar seperti transparansi tata kelola, kolaborasi antar-lembaga, kemandirian daerah, partisipasi publik, serta rasionalitas

² S. Azmi, "Pendidikan Kewarganegaraan Merupakan Salah Satu Pengejawantahan Dimensi Manusia sebagai Makhluk Individu, Sosial, Susila, dan Makhluk Religi," *Jurnal Likhitaprajna* 18, no. 1 (2016): 77–86, <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v18i1.30>.

³ Fahri Bachmid, "Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 87–103, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>.

kebijakan⁴. DPRD memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Proses identifikasi sumber PAD baru harus dilakukan melalui kajian ilmiah, *benchmarking* ke daerah lain, serta analisis mendalam terhadap potensi ekonomi lokal agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif dan tidak membebani masyarakat.

Analisis ini dilakukan guna memahami bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan menilai dan menempatkan peran DPRD dalam proses mendorong Pemerintah Kota Tangerang menggali sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru. Dengan menganalisis nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas, transparansi, kolaborasi, serta tanggung jawab pemerintah lokal, studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan fiskal daerah dilandasi oleh nilai kewarganegaraan yang ideal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi kontribusi akademik dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Hasil & Pembahasan

Representasi Kepentingan Publik

Tabel 1. Kebijakan DPRD

No.	Kebijakan DPRD	Aspek Pendidikan Kewarganegaraan
1	DPRD menuntut Pemkot menggali sumber PAD baru sebagai wujud representasi kepentingan publik.	Demokrasi perwakilan, legitimasi politik, keberpihakan pada rakyat, pemenuhan aspirasi publik.
2	DPRD melakukan pengawasan intensif terhadap perencanaan PAD dan efektivitas kebijakan fiskal.	Akuntabilitas publik, kontrol legislatif, mekanisme <i>checks and balances</i> .
3	DPRD dan Pemkot bekerja sama menyusun APBD 2026 dan identifikasi potensi PAD baru.	Kolaborasi pemerintahan daerah, sinergi legislatif–eksekutif, <i>good governance</i> .
4	Pemkot diminta mengembangkan inovasi pendapatan: ekonomi kreatif,	Kreativitas kebijakan publik, inovasi sosial, pemanfaatan potensi lokal.

⁴ T. W. Budiutomo, “Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa,” *Academy of Education Journal* 4, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.47200/aocj.v4i1.94>.

No.	Kebijakan DPRD	Aspek Pendidikan Kewarganegaraan
	digitalisasi retribusi, pariwisata, aset daerah.	
5	DPRD mendorong kemandirian fiskal agar Pemkot tidak bergantung pada transfer pusat.	Otonomi daerah, kemandirian ekonomi lokal, desentralisasi fiskal.
6	Pemkot diminta membuat kajian rasional dan <i>benchmarking</i> terkait PAD baru.	Kebijakan berbasis riset (<i>evidence-based policy</i>), rasionalitas administrasi publik.
7	Penyusunan APBD difokuskan pada efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan.	Efektivitas anggaran, efisiensi, prinsip good governance, perencanaan pembangunan.
8	Peningkatan PAD diarahkan untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.	Pemenuhan hak publik, kesejahteraan umum, kualitas pelayanan publik.
9	DPRD mengharuskan Pemkot lebih transparan dalam perencanaan dan penggunaan PAD baru.	Transparansi, keterbukaan informasi publik, akuntabilitas fiskal.
10	Pemkot bertanggung jawab memastikan PAD digunakan untuk kepentingan rakyat secara adil dan merata.	Tanggung jawab pemerintah lokal, keadilan sosial, etika pemerintahan.

Sumber: merdeka.com

Representasi kepentingan publik dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan merupakan konsep yang menempatkan wakil rakyat sebagai pihak yang membawa, mengawal, dan memperjuangkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat ke dalam proses penyelenggaraan pemerintahan⁵. Dalam praktiknya, hal ini berarti DPRD harus memahami secara utuh apa yang menjadi kebutuhan warga dan memastikan kebutuhan tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang berorientasi kesejahteraan⁶. Ketika DPRD Kota Tangerang mendesak Pemerintah Kota Tangerang untuk menggali sumber

⁵ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017).

⁶ D. Dakhi, “Analisis Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik bagi Peserta Didik,” *Attractive: Innovative Education Journal* 5, no. 1 (2023): 421–427, <http://doi:10.51278/aj.v5i1.642>.

Pendapatan Asli Daerah yang baru, tindakan tersebut merupakan bentuk representasi yang konkret. DPRD menyadari bahwa warga membutuhkan layanan publik yang semakin berkualitas dan merata, sedangkan peningkatan kualitas layanan tidak mungkin terjadi apabila kapasitas fiskal daerah stagnan atau hanya bergantung pada pola pendapatan lama.⁷

Representasi kepentingan publik juga mengharuskan DPRD untuk mengedepankan perspektif masyarakat dalam setiap keputusan anggaran. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dijelaskan bahwa wakil rakyat tidak boleh memosisikan diri sebagai elit politik yang terpisah dari warga, melainkan sebagai penyambung suara rakyat yang memahami kondisi riil kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Dengan kondisi Kota Tangerang yang terus berkembang dan jumlah penduduk yang semakin tinggi, kebutuhan akan peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan yang mudah diakses, pendidikan berkualitas, serta layanan administrasi publik yang lebih efisien semakin mendesak. DPRD melihat bahwa tanpa diversifikasi sumber pendapatan, APBD tidak akan mampu menjawab seluruh tantangan tersebut. Oleh karena itu, dorongan menggali PAD baru merupakan kewajiban moral DPRD agar kepentingan publik benar-benar menjadi prioritas dalam kebijakan keuangan daerah.

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, representasi kepentingan publik juga menyangkut aspek legitimasi. DPRD sebagai lembaga yang dipilih melalui proses demokratis wajib mempertanggungjawabkan mandat tersebut melalui tindakan nyata yang berpihak pada masyarakat⁸. Ketika DPRD meminta Pemerintah Kota Tangerang melakukan kajian mendalam, melakukan *benchmarking* ke daerah lain, dan mengidentifikasi potensi ekonomi baru, langkah tersebut menunjukkan bahwa DPRD tidak sekadar menunggu laporan dari eksekutif, melainkan aktif mendorong inovasi. Keaktifan ini

⁷ Merdeka.com.”DPRD Minta Pemkot Tangerang Tingkatkan PAD Kota Tangerang dari Sumber Baru untuk Layanan Prima” diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/dprd-minta-pemkot-tangerang-tingkatkan-pad-kota-tangerang-dari-sumber-baru-untuk-layanan-prima-501489-mvk.html?page=2>

⁸ I. Efendi, “Pendidikan Kewarganegaraan: Wahana Pengembangan Kompetensi Warganegara dalam Pengenalan Partisipasi Politik Siswa Sekolah Dasar,” *Didaktika Taubidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 7, no. 2 (2020): 149–162, <https://doi.org/10.30997/dt.v7i2.2635>.

menjadi pilar penting dalam memperkuat legitimasi politik DPRD karena masyarakat akan melihat bahwa lembaga perwakilan benar-benar bekerja untuk mereka, bukan hanya menjalankan fungsi formalitas. Sikap aktif ini juga menegaskan bahwa representasi tidak berhenti pada simbolisasi, tetapi hadir dalam bentuk pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga.

Representasi kepentingan publik dalam Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap dinamika ekonomi dan sosial masyarakat. DPRD Kota Tangerang memahami bahwa berbagai potensi ekonomi daerah belum digarap secara maksimal misalnya peluang sektor ekonomi kreatif, pengembangan pusat UMKM, optimalisasi kawasan komersial, pengelolaan parkir modern, retribusi digital, dan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif. Dengan mendorong Pemerintah Kota mengembangkan sumber PAD baru, DPRD sebenarnya sedang memastikan bahwa seluruh potensi daerah tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini penting karena representasi tidak hanya berarti memperjuangkan kebutuhan saat ini, tetapi juga memikirkan strategi pembangunan jangka panjang agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, representasi kepentingan publik juga berarti menjaga keadilan distribusi layanan dan manfaat kebijakan. DPRD Kota Tangerang menilai bahwa peningkatan PAD bukan hanya soal menambah pendapatan daerah, tetapi juga terkait bagaimana pendapatan tersebut dapat menjamin pemerataan layanan dasar⁹. Tanpa pendapatan yang cukup, pemerintah daerah cenderung memprioritaskan program tertentu sementara program pelayanan publik lainnya terbengkalai. Dengan menegaskan pentingnya PAD baru, DPRD menunjukkan keberpihakan terhadap pemerataan akses layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur.

Representasi kepentingan publik juga berkaitan erat dengan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Pendidikan Kewarganegaraan memandang DPRD sebagai pengawal kepentingan masyarakat, yang harus memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran berorientasi pada kesejahteraan publik dan bukan pada kepentingan

⁹ Mirza Hardian et al., "Gagasan Pendidikan Politik bagi Generasi Muda (Sebuah Kajian Literatur)," *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual* 6, no. 3 (2021): 552, <https://doi.org/10.28926/briliant.v6i3.653>.

sempit birokrasi¹⁰. Dengan mendorong peningkatan PAD baru, DPRD bukan hanya meminta pemerintah daerah menggali pendapatan, tetapi juga memberikan sinyal bahwa anggaran harus disusun secara rasional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Representasi menjadi kuat ketika DPRD turut mengawasi bagaimana PAD baru itu nanti diarahkan, apakah benar masuk ke sektor prioritas seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan fasilitas publik, dan perlindungan sosial.

Representasi kepentingan publik dalam Pendidikan Kewarganegaraan menekankan bahwa wakil rakyat harus memastikan semua kebijakan daerah membawa dampak positif langsung bagi masyarakat. Dorongan DPRD Kota Tangerang agar pemerintah menggali sumber PAD baru merupakan bagian dari upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan kota dan kualitas layanan publik yang semakin baik¹¹. Dengan struktur APBD 2026 yang menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp5,1 triliun dan belanja Rp5,5 triliun, jelas bahwa daerah membutuhkan kreativitas fiskal. DPRD menyadari kondisi tersebut dan kemudian bertindak mewakili suara rakyat agar tidak terjadi stagnasi pembangunan.

Penguatan Fungsi Pengawasan

Penguatan fungsi pengawasan merupakan elemen kunci dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang menempatkan wakil rakyat sebagai pengontrol jalannya pemerintahan daerah agar tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat¹². DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki mandat untuk mengawasi seluruh proses kebijakan Pemerintah Kota, termasuk kebijakan fiskal, program pembangunan, dan pemanfaatan pendapatan daerah. Ketika DPRD Kota Tangerang mendesak Pemerintah Kota untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah baru, tindakan tersebut memperlihatkan bagaimana fungsi pengawasan dijalankan bukan hanya pada tahap evaluasi, tetapi juga pada tahap perumusan dan perencanaan kebijakan. Artinya, DPRD

¹⁰ B. Juliardi, "Implementasi Pendidikan Karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 2, no. 2 (2015): 3.

¹¹ Ronni Juwandi, Yasin Nurwahid, dan Ayu Lestari, "Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik untuk Mengembangkan Literasi Digital Warga Negara," dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, vol. 2 (2019): 369–378.

¹² D. Kharisma, "Peran Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda," *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 7 (2015): 1144.

tidak menunggu sampai persoalan muncul, melainkan mengantisipasi potensi stagnasi pendapatan dengan mendorong langkah-langkah baru yang strategis.

Dalam konsep Pendidikan Kewarganegaraan, pengawasan legislatif harus dilakukan untuk memastikan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas formal, tetapi juga menjalankan pemerintahan secara efektif, efisien, dan responsif. Ketika DPRD meminta Pemerintah Kota Tangerang melakukan kajian, studi banding, dan *benchmarking* ke daerah lain terkait potensi PAD baru, tindakan itu merupakan bentuk kontrol kebijakan yang berbasis rasionalitas dan bukti. DPRD menginginkan agar pemerintah daerah tidak sekadar menjalankan rutinitas anggaran, tetapi benar-benar mencari solusi optimal untuk meningkatkan kapasitas fiskal. Sikap ini menunjukkan bagaimana pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan laporan keuangan atau hasil evaluasi tahunan, tetapi juga mencakup dorongan agar Pemerintah Kota berinovasi dan melakukan transformasi pengelolaan pendapatan daerah.

Penguatan fungsi pengawasan juga berkaitan erat dengan nilai akuntabilitas dalam Pendidikan Kewarganegaraan. DPRD wajib memastikan bahwa Pemerintah Kota menggunakan seluruh sumber daya publik dengan penuh tanggung jawab. Ketika DPRD meminta adanya inovasi dalam penggalian sumber PAD, ini bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga soal pertanggungjawaban moral dan administratif pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Pemerintah tidak boleh bergantung pada pendapatan tradisional semata, sementara potensi ekonomi baru dibiarkan tidak tergarap. Dengan melakukan pengawasan yang tegas, DPRD memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan pembiaran terhadap potensi pendapatan dan tidak menunda kebijakan yang sebenarnya penting bagi masyarakat.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dijelaskan bahwa pengawasan legislatif tidak hanya menyangkut aspek formal keuangan, tetapi juga bagaimana implementasi kebijakan memenuhi prinsip pemerintahan yang baik. Hal ini meliputi transparansi, efektivitas, dan orientasi kesejahteraan masyarakat. Dengan menekankan pentingnya identifikasi dan pengembangan potensi PAD baru, DPRD pada dasarnya menuntut Pemerintah Kota untuk menjalankan pemerintahan secara terbuka dan berbasis data. Pemerintah harus mampu menjelaskan apa saja sumber-sumber pendapatan yang memungkinkan untuk dikembangkan, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana

dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kejelasan tersebut merupakan bagian penting dari transparansi, yang merupakan salah satu prinsip utama pengawasan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.¹³

Dalam konteks APBD 2026 yang mencapai Rp5,1 triliun di sisi pendapatan dan Rp5,5 triliun di sisi belanja, pengawasan terhadap struktur anggaran menjadi semakin penting. Pendidikan Kewarganegaraan menekankan bahwa DPRD harus memastikan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan birokrasi atau kelompok tertentu. Dengan mendorong penambahan sumber PAD baru, DPRD sedang mengawasi agar Pemerintah Kota tidak membuat anggaran yang tidak realistis atau defisit berlebihan. Pengawasan ini penting agar program-program prioritas seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur modern, dan penguatan ekonomi berkeadilan memiliki pendanaan yang memadai.¹⁴

Penguatan pengawasan DPRD juga tampak dalam upaya memastikan bahwa kebijakan untuk menggali PAD baru benar-benar dilakukan dengan memperhatikan prinsip keseimbangan antara kemampuan masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Pendidikan Kewarganegaraan menekankan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh memberatkan masyarakat, misalnya melalui penambahan pajak yang tidak proporsional. Oleh karena itu, pengawasan DPRD diarahkan pada pencarian sumber PAD baru yang inovatif, produktif, dan tidak membebani warga. DPRD mendorong potensi pendapatan yang berasal dari pengelolaan aset, pengembangan pariwisata, pemberdayaan UMKM, digitalisasi retribusi, dan optimalisasi wilayah komersial. Semua ini menunjukkan bahwa pengawasan legislatif memastikan Pemerintah Kota tetap memegang prinsip keadilan sosial dan keseimbangan dalam kebijakan publik.

¹³ DPRD Kota Tangerang, “DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang Sepakati Anggaran Belanja Daerah 2026 Sebesar Rp 5,53 triliun,” DPRD Kota Tangerang, 27 November 2025, <https://dprd.tangerangkota.go.id/dprd-artikel-detail/dprd-dan-pemerintah-kota-tangerang-sepakati-anggaran-belanja-daerah-2026-sebesar-rp-5-53-triliun>

¹⁴ Pemerintah Kota Tangerang, “Sampaikan Raperda APBD 2026, Sachrudin Optimis Realisasikan Program Pembangunan,” Pemerintah Kota Tangerang, 16 Oktober 2025, <https://tangerangkota.go.id/berita/detail/56983/sampaikan-raperda-apbd-2026-sachrudin-optimis-realisasikan-program-pembangunan>

Penguatan fungsi pengawasan dalam Pendidikan Kewarganegaraan menekankan bahwa DPRD harus memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah membawa dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar tertulis dalam dokumen perencanaan. Dengan mendorong Pemerintah Kota Tangerang menggali sumber PAD baru, DPRD memastikan bahwa kebijakan anggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mendukung peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pengawasan yang dilakukan DPRD pada konteks ini merupakan bentuk penjagaan agar pemerintah tetap berada pada jalur pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Kolaborasi Pemerintahan Daerah

Kolaborasi pemerintahan daerah merupakan prinsip dasar dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks DPRD Kota Tangerang yang mendorong Pemerintah Kota Tangerang menggali sumber Pendapatan Asli Daerah baru, kolaborasi bukan hanya sekadar kerja sama administratif, tetapi bentuk integrasi peran dan fungsi kelembagaan dalam membangun daerah. DPRD tidak hanya menjadi pengkritik atau pengawas, melainkan mitra aktif yang ikut merumuskan strategi fiskal bersama pemerintah¹⁵. Kolaborasi semacam ini mencerminkan nilai Pendidikan Kewarganegaraan yang memandang pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem yang saling bergantung dalam membawa daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dijelaskan bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar proses kebijakan publik berjalan secara seimbang, tidak dimonopoli satu pihak, dan tetap berpijak pada kebutuhan warga. Dorongan DPRD untuk melakukan pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah baru menunjukkan bahwa lembaga legislatif mengambil peran sebagai *co-creator* kebijakan, bukan hanya pengesahan anggaran. DPRD Kota Tangerang melihat bahwa Pemerintah Kota membutuhkan dukungan politik, gagasan, dan pengawasan agar strategi peningkatan pendapatan

¹⁵ H. Khatimah, I. M. Kartika, dan I. G. N. Santika, "Pengaruh Implementasi Pendidikan Karakter terhadap Sikap Sosial pada Siswa," *Widya Accarya* 13, no. 2 (2022): 127–132.

daerah benar-benar berjalan efektif. Dalam konteks ini, kolaborasi berarti saling melengkapi: eksekutif sebagai pelaksana teknis, dan legislatif sebagai pengarah, pengendali, sekaligus pendorong inovasi kebijakan daerah.

Kolaborasi pemerintahan daerah juga berkaitan erat dengan konsep keterpaduan visi dan misi pembangunan sebagaimana diatur dalam prinsip Pendidikan Kewarganegaraan. Ketika DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026, kolaborasi ini tercermin dalam keselarasan antara prioritas pembangunan dan kapasitas fiskal daerah. DPRD memastikan bahwa anggaran tersebut memuat prioritas seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berkeadilan, pembangunan infrastruktur modern, dan penguatan lingkungan hidup. Pemerintah Kota, di sisi lain, memerlukan dukungan DPRD untuk mengalokasikan dana yang memadai dan menjalankan program tersebut secara efektif. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah bukan semata pekerjaan pemerintah eksekutif, tetapi hasil kerja bersama yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan responsivitas publik.

Dalam konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kolaborasi pemerintahan daerah tampak pada dorongan DPRD agar Pemerintah Kota melakukan kajian dan *benchmarking* ke daerah lain. Pendidikan Kewarganegaraan menekankan bahwa pembuatan kebijakan yang baik memerlukan kerja sama lintas lembaga untuk mengumpulkan informasi, melakukan evaluasi, serta membandingkan praktik terbaik dari daerah lain. DPRD berkontribusi dengan memberikan arahan politik dan memastikan proses tersebut mendapatkan dukungan anggaran. Pemerintah Kota bertugas menjalankan kajian teknis dan implementasi. Kolaborasi semacam ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak mungkin tercapai apabila hanya dijalankan oleh salah satu lembaga, melainkan membutuhkan komitmen bersama dalam setiap tahapan kebijakan.

Pendidikan Kewarganegaraan juga mengajarkan bahwa kolaborasi pemerintahan daerah harus dilandasi oleh prinsip saling percaya, keterbukaan, dan komunikasi yang intens. Dorongan DPRD terhadap penggalan PAD baru harus diikuti oleh keterbukaan Pemerintah Kota dalam menyampaikan potensi pendapatan yang telah diidentifikasi, kendala yang dihadapi, dan kebutuhan dukungan

legislatif¹⁶. DPRD juga harus bersedia memberikan masukan, melakukan evaluasi, serta memfasilitasi proses politik agar kebijakan tersebut dapat terlaksana. Kolaborasi yang sehat berarti tidak ada dominasi satu pihak atas pihak lain; keduanya bekerja dalam hubungan kemitraan sejajar untuk menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat.

Kolaborasi dalam pemerintahan daerah juga sangat penting untuk menciptakan integrasi program dan penghematan anggaran. Pendidikan Kewarganegaraan memandang bahwa kebijakan publik harus efisien dan tidak menimbulkan tumpang tindih program. Dalam hal ini, DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang perlu bekerja sama agar program peningkatan Pendapatan Asli Daerah terintegrasi dengan program pembangunan lainnya, terutama sektor ekonomi, pariwisata, UMKM, dan pengelolaan aset daerah. Dengan adanya kolaborasi, berbagai kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung, sehingga dapat mengoptimalkan anggaran dan mempercepat dampak pembangunan.

Kolaborasi pemerintahan daerah merupakan wujud implementasi dari nilai luhur Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan bahwa pemerintahan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dorongan DPRD Kota Tangerang agar Pemerintah Kota menggali sumber Pendapatan Asli Daerah baru bukan hanya urusan fiskal, tetapi bagian dari upaya kolektif memajukan kota dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kolaborasi legislatif eksekutif memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bukan hanya legal, tetapi juga legitimasi dan berlandaskan kepentingan publik. Ketika DPRD dan Pemerintah Kota bekerja bersama, masyarakat mendapatkan jaminan bahwa kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil musyawarah dan pemikiran yang matang.

Inovasi Sumber Pendapatan

Inovasi sumber pendapatan dalam konteks pembangunan daerah merupakan agenda strategis yang sejalan dengan nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan, terutama mengenai kemandirian daerah, kreativitas kebijakan publik, dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ketika DPRD Kota Tangerang menekankan pentingnya menggali sumber

¹⁶ Putri Limilia dan Endah Ariadne, "Pengetahuan dan Persepsi Politik pada Remaja," *Jurnal Psikologi Sosial* 16, no. 1 (2018): 45–55.

Pendapatan Asli Daerah baru, hal ini tidak hanya menunjukkan kebutuhan fiskal daerah, tetapi juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah harus keluar dari pola tradisional pengelolaan pendapatan yang selama ini terlalu bergantung pada pajak dan retribusi klasik seperti pajak hotel, restoran, dan parkir. Pendidikan Kewarganegaraan memandang inovasi sebagai fondasi penting dalam menjamin keberlanjutan pembangunan, sehingga dorongan DPRD untuk melakukan inovasi pendapatan merupakan langkah tepat agar pemerintah daerah mampu merespons dinamika ekonomi modern yang terus berubah.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi lokal secara optimal¹⁷. Inovasi sumber pendapatan tidak terlepas dari bagaimana Pemerintah Kota Tangerang memahami, mengidentifikasi, dan mengelola berbagai peluang ekonomi yang muncul dari perkembangan sosial dan teknologi. Dorongan DPRD agar pemerintah melakukan kajian mendalam dan *benchmarking* ke daerah lain menunjukkan bahwa inovasi tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, tetapi memerlukan basis pengetahuan, data empiris, serta pemahaman terhadap perkembangan terbaik di daerah lain.

Inovasi sumber pendapatan juga berkaitan erat dengan prinsip efektivitas kebijakan yang menjadi kajian penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kebijakan inovatif tidak hanya menghasilkan pemasukan, tetapi juga membawa manfaat ganda bagi masyarakat, seperti peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan sektor UMKM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik¹⁸. DPRD Kota Tangerang menekankan bahwa inovasi PAD harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi. Misalnya, pengembangan kawasan UMKM terpadu dapat menjadi sumber retribusi baru sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Studi banding yang diusulkan DPRD menjadi langkah strategis untuk menemukan sektor-sektor yang terbukti sukses di

¹⁷ S. D. Mulyani, "Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa," *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan* 12, no. 2 (2022): 104–113.

¹⁸ T. H. Nurgiansah, "Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan," *Jurnal Civic Hukum* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.14994>.

daerah lain, sehingga Kota Tangerang dapat meniru atau mengadaptasinya sesuai karakter lokal.

Dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, inovasi sumber pendapatan juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal secara kreatif dan berkelanjutan. Kota Tangerang memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti pengelolaan pasar daerah berbasis digital, optimalisasi terminal, revitalisasi taman kota sebagai ruang ekonomi kreatif, pengembangan *event-based tourism*, hingga monetisasi aset digital pemerintah. Dorongan DPRD agar pemerintah daerah melihat potensi ini sebagai sumber PAD merupakan bukti bahwa legislatif menjalankan peran visioner dalam perencanaan fiskal. Inovasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk menambah pendapatan daerah, tetapi juga membangun identitas kota yang modern, dinamis, dan berdaya saing.

Inovasi sumber pendapatan harus selalu sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana ditekankan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Artinya, pemerintah daerah tidak boleh hanya bertumpu pada kebijakan yang berpotensi membebani masyarakat, seperti menaikkan tarif pajak atau retribusi tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi warga. Oleh karena itu, DPRD Kota Tangerang secara tegas mendorong Pemerintah Kota untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang tidak menambah beban masyarakat secara langsung. Inovasi seperti pengelolaan ruang publik berbayar, kerja sama pengembangan properti, optimalisasi parkir digital, serta pengembangan kawasan wisata kota menjadi alternatif yang lebih adil.

Selain itu, inovasi pendapatan juga harus berlandaskan transparansi dan akuntabilitas, dua nilai yang sangat dijunjung dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap ide pendapatan baru dikaji secara terbuka, melibatkan opini ahli, serta melibatkan partisipasi publik dalam penyusunannya. DPRD Kota Tangerang memainkan peran penting dalam memastikan proses inovasi pendapatan ini tidak diselubungi kepentingan kelompok tertentu atau praktik-praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Sebagai lembaga pengawas, DPRD harus memastikan bahwa sumber pendapatan baru itu memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang terukur, serta dampak sosial-ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Inovasi sumber pendapatan dalam konteks Kota Tangerang harus dipahami sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada

peningkatan layanan publik. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bahwa seluruh kebijakan penerimaan daerah pada akhirnya harus kembali kepada tujuan utama negara, yaitu menciptakan kesejahteraan umum. Ketika DPRD mendorong Pemerintah Kota untuk mengembangkan PAD baru, tujuan sebenarnya adalah memastikan agar APBD 2026 dan tahun-tahun berikutnya memiliki kapasitas yang cukup untuk mendanai program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Dengan inovasi pendapatan, Kota Tangerang tidak hanya menghindari ketergantungan pada transfer pusat, tetapi juga membangun fondasi ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan.

Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal daerah merupakan pilar utama dalam implementasi otonomi daerah yang menjadi salah satu kajian sentral dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Konsep ini menekankan bahwa daerah harus mampu membiayai sendiri kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung secara berlebihan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dalam konteks Kota Tangerang, dorongan DPRD agar Pemerintah Kota menggali sumber Pendapatan Asli Daerah baru mencerminkan kesadaran legislatif bahwa kemandirian fiskal adalah syarat mutlak keberhasilan pembangunan daerah. Dengan pendapatan daerah yang pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp5,1 triliun, di mana sekitar Rp3,2 triliun berasal dari PAD dan Rp1,9 triliun merupakan pendapatan transfer, terlihat bahwa kontribusi PAD belum cukup dominan.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, kemandirian fiskal memiliki hubungan erat dengan prinsip kedaulatan daerah. Pemerintah daerah yang mandiri secara fiskal memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan lokal tanpa tekanan dari mekanisme transfer pusat. DPRD Kota Tangerang memahami bahwa bergantung pada dana transfer dapat membuat daerah rentan terhadap perubahan kebijakan nasional yang tidak selalu sesuai dengan prioritas lokal. Oleh karena itu, DPRD menekankan pentingnya menggali sumber PAD baru agar Kota Tangerang mampu berdiri secara fiskal dan menjalankan pembangunan tanpa hambatan administratif. Kemandirian fiskal dalam hal ini bukan berarti menolak bantuan pusat, tetapi menyeimbangkan posisi daerah agar lebih kuat dalam menentukan arah kebijakan.

Kemandirian fiskal daerah juga mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi secara kreatif, inovatif, dan berkelanjutan¹⁹. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bahwa pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, seperti sektor jasa, perdagangan, industri kreatif, pariwisata, dan pengelolaan aset publik. Dorongan DPRD agar dilakukan kajian dan *benchmarking* ke daerah lain menunjukkan bahwa legislatif menginginkan Pemerintah Kota untuk mengambil inspirasi dari keberhasilan daerah lain dalam memaksimalkan pendapatan mandiri.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, kemandirian fiskal juga dipahami sebagai mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Daerah yang mandiri dalam pendapatan cenderung lebih bertanggung jawab dalam mengalokasikan anggaran karena dana yang digunakan merupakan hasil kontribusi dan aset lokal. DPRD Kota Tangerang melalui dorongan menggali PAD baru ingin memastikan bahwa Pemerintah Kota tidak hanya mengandalkan pola anggaran lama, tetapi juga berani menerapkan strategi baru yang lebih transparan dan produktif. Kemandirian fiskal menuntut pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan secara terbuka, menjelaskan potensi dan risiko kebijakan pendapatan, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kemandirian fiskal juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Pendapatan daerah yang kuat dan mandiri memastikan bahwa layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan administrasi dapat diberikan secara merata tanpa diskriminasi. DPRD menyadari bahwa ketergantungan pada pendapatan transfer dapat menyebabkan layanan publik tidak stabil, terutama apabila alokasi dari pusat mengalami penurunan atau keterlambatan²⁰. Dengan memperkuat PAD melalui sumber-sumber inovatif, Kota Tangerang dapat menjamin keberlanjutan layanan publik yang menjadi hak warga negara.

¹⁹ S. B. Pramusantri, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Politik Pemilih Pemula* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), <https://doi.org/10.7454/jps.2018.5>.

²⁰ A. Rahman, "Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 44–51, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8385>.

Kemandirian fiskal daerah dalam hal ini bertujuan untuk memastikan akses layanan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan menekankan bahwa kemandirian fiskal memberikan pemerintah daerah kemampuan untuk membangun program-program unggulan yang sesuai dengan identitas lokal²¹. Dengan PAD yang kuat, Kota Tangerang dapat menciptakan program pembangunan yang lebih spesifik, seperti pengembangan ekonomi kreatif, revitalisasi pusat kuliner, pembangunan sarana publik modern, dan penguatan program sosial berbasis komunitas. Dorongan DPRD untuk meningkatkan PAD adalah langkah strategis agar Pemerintah Kota dapat lebih kreatif dan fleksibel dalam menyusun program yang benar-benar mencerminkan kebutuhan warga.

Kemandirian fiskal daerah merupakan tujuan jangka panjang yang harus dicapai melalui kerja sama legislatif dan eksekutif dalam satu kesatuan sistem pemerintahan daerah. Dorongan DPRD Kota Tangerang agar Pemerintah Kota menggali sumber PAD baru merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat fondasi fiskal daerah agar mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Pendidikan Kewarganegaraan menegaskan bahwa keberhasilan kemandirian fiskal tidak hanya diukur dari jumlah pendapatan, tetapi dari kemampuan daerah dalam mengelola anggaran secara efisien dan mengarahkannya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan Kebijakan Rasional

Perencanaan kebijakan rasional merupakan salah satu prinsip inti dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus disusun berdasarkan data, analisis objektif, dan orientasi pada kepentingan masyarakat²². Dalam konteks DPRD Kota Tangerang yang mendesak Pemerintah Kota untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah baru, perencanaan kebijakan yang rasional menjadi sangat penting agar inovasi pendapatan tidak dilakukan secara

²¹ I. G. N. Santika, *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi dengan UUD 1945)* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021).

²² S. Tamma, "Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembentukan Preferensi Politik Awal Pemilih Pemula," *Jurnal Politik Profetik* 9, no. 1 (2021): 43–57, <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i1a3>.

intuitif atau serampangan²³. DPRD memahami bahwa kota dengan dinamika ekonomi setinggi Tangerang memerlukan kebijakan fiskal yang direncanakan secara matang, sesuai kebutuhan publik, serta berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan yang rasional memastikan bahwa setiap sumber pendapatan baru yang digali benar-benar realistis, efektif, dan sejalan dengan tujuan pembangunan daerah.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, perencanaan kebijakan rasional mencakup tahapan identifikasi masalah, perumusan alternatif kebijakan, analisis biaya dan manfaat, hingga penentuan pilihan terbaik yang paling menguntungkan masyarakat. Dorongan DPRD agar Pemerintah Kota Tangerang melakukan kajian dan *benchmarking* ke daerah lain menunjukkan bahwa legislatif menginginkan prosedur perencanaan yang berbasis penelitian, bukan sekadar asumsi. *Benchmarking* diperlukan agar Kota Tangerang dapat melihat apa yang berhasil diberlakukan di daerah lain, bagaimana prosesnya, dan apakah strategi tersebut dapat diadaptasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Langkah ini membuktikan bahwa DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan pola pikir ilmiah dan metodologis dalam merancang kebijakan pendapatan.

Perencanaan kebijakan rasional juga menuntut pemerintah daerah untuk memahami karakteristik sosial-ekonomi masyarakat secara komprehensif. Pendidikan Kewarganegaraan menekankan bahwa kebijakan yang baik harus mempertimbangkan kondisi masyarakat, potensi daerah, serta kemampuan fiskal pemerintah. Dalam hal ini, DPRD Kota Tangerang ingin memastikan bahwa kebijakan penggalan Pendapatan Asli Daerah tidak membebani masyarakat melalui kenaikan pajak yang tidak proporsional, tetapi diarahkan pada inovasi pendapatan yang bersumber dari pengelolaan aset, pemanfaatan sektor ekonomi kreatif, dan pengembangan kawasan produktif. Perencanaan rasional berarti kebijakan pendapatan harus sensitif terhadap kemampuan masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pungutan, tetapi juga penerima manfaat dari pendapatan yang dihasilkan.

²³ N. A. R. T. Wulandari dan U. Dayati, "Hubungan Pengetahuan Kewarganegaraan dengan Partisipasi Politik Mahasiswa," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 361–367, <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p361-367>.

Dalam kerangka Pendidikan Kewarganegaraan, perencanaan kebijakan rasional juga mengharuskan proses perumusan kebijakan dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berbasis partisipasi publik. DPRD Kota Tangerang secara tegas mendorong Pemerintah Kota untuk menjelaskan secara transparan bagaimana sumber pendapatan baru akan diidentifikasi, dikaji, dan dievaluasi. Transparansi ini sangat penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat atau menimbulkan kesan bahwa PAD baru hanya menguntungkan pihak tertentu.

Perencanaan kebijakan rasional juga bersifat strategis dan berjangka panjang. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada keberlanjutan, bukan hanya sekadar merespons kebutuhan jangka pendek. Dalam konteks ini, DPRD mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk merancang kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang tidak hanya meningkatkan pendapatan tahun 2026, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi kota dalam jangka panjang. Dengan mengembangkan potensi ekonomi kreatif, digitalisasi sektor retribusi, dan pengelolaan aset daerah yang profesional, Kota Tangerang dapat memiliki sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan.

Selain itu, perencanaan kebijakan rasional harus mencakup evaluasi risiko dan mitigasi dampak. Pendidikan Kewarganegaraan menekankan bahwa kebijakan publik tidak boleh dibuat tanpa memperhitungkan implikasi negatif atau hambatan yang mungkin terjadi. DPRD Kota Tangerang mendorong Pemerintah Kota untuk melakukan kajian mendalam mengenai potensi risiko, seperti konflik lahan, resistensi masyarakat, biaya implementasi yang tinggi, atau dampak lingkungan dari sumber pendapatan baru. Evaluasi risiko ini penting agar pemerintah dapat menyiapkan strategi mitigasi yang tepat, sehingga inovasi PAD tidak menimbulkan masalah baru yang justru merugikan masyarakat. Perencanaan rasional berarti keputusan diambil dengan kehati-hatian tinggi berdasarkan analisis komprehensif.

Perencanaan kebijakan rasional dalam konteks penggalan Pendapatan Asli Daerah baru merupakan manifestasi dari nilai-nilai inti Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu tanggung jawab publik, efektivitas pemerintahan, dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat. DPRD Kota Tangerang menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga oleh apakah pendapatan tersebut benar-benar mampu meningkatkan

layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur. Ketika DPRD mendorong Pemerintah Kota untuk merancang kebijakan pendapatan secara rasional, DPRD sedang memastikan bahwa kebijakan fiskal kota berpihak kepada masyarakat.

Optimalisasi Anggaran Daerah

Optimalisasi anggaran daerah merupakan salah satu fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, dan hal ini menjadi fokus penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Optimalisasi anggaran berarti memastikan bahwa seluruh komponen pendapatan maupun belanja daerah direncanakan, dialokasikan, dan digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Kota Tangerang, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah baru agar struktur APBD dapat mendukung program prioritas yang telah disepakati. Dengan APBD 2026 yang mencantumkan pendapatan Rp5,1 triliun dan belanja Rp5,5 triliun, jelas bahwa pemerintah membutuhkan strategi optimalisasi anggaran, baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pemanfaatan anggaran yang lebih efektif.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, optimalisasi anggaran daerah dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas publik. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dorongan DPRD agar pemerintah mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah baru bukan sekadar langkah fiskal, tetapi strategi untuk memperkuat kapasitas anggaran agar lebih leluasa membiayai program pembangunan daerah. Optimalisasi tidak hanya dilakukan melalui efisiensi belanja, tetapi juga melalui langkah proaktif DPRD memastikan pendapatan daerah berkembang melalui inovasi dan modernisasi kebijakan fiskal.

Optimalisasi anggaran daerah juga menuntut sinkronisasi antara prioritas pembangunan dan kemampuan anggaran, sebuah konsep penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan. DPRD Kota Tangerang melalui pembahasan APBD 2026 memastikan bahwa anggaran yang disusun sejalan dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur modern, penguatan lingkungan hidup, dan pemerataan pelayanan publik. Dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru, struktur pendapatan daerah menjadi lebih solid sehingga pembangunan daerah

tidak mengalami stagnasi akibat keterbatasan anggaran. Sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya realistis, tetapi juga progresif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga negara.

Konsep optimalisasi anggaran dalam Pendidikan Kewarganegaraan juga berkaitan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Pemerintah daerah dituntut untuk meminimalkan pemborosan, menghindari duplikasi program, dan memastikan bahwa anggaran dikelola secara profesional. Dorongan DPRD kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk berinovasi dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari upaya memastikan anggaran dapat digunakan secara optimal. Pendapatan yang meningkat dan dikelola secara efektif akan memungkinkan pemerintah menjalankan lebih banyak program tanpa harus menambah beban fiskal atau memotong anggaran penting lainnya. Efektivitas penggunaan anggaran menjadi tujuan penting agar program pembangunan dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Optimalisasi anggaran daerah juga mencakup penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan anggaran. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bahwa anggaran daerah merupakan dokumen publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada warga. Dengan adanya dorongan DPRD untuk penggalan sumber pendapatan baru, transparansi menjadi semakin penting, terutama dalam menjelaskan kepada masyarakat bagaimana pendapatan baru tersebut akan digunakan. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari inovasi kebijakan benar-benar digunakan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Optimalisasi anggaran daerah juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, sebagaimana ditekankan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Anggaran bukan hanya dokumen teknis, tetapi instrumen pemerataan pembangunan. DPRD Kota Tangerang memastikan bahwa alokasi anggaran 2026 memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber-sumber inovatif memberi peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memperluas cakupan program sosial, menambah fasilitas publik, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Optimalisasi anggaran daerah dalam konteks Kota Tangerang merupakan proses komprehensif yang melibatkan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan masyarakat, kondisi fiskal, serta prioritas pembangunan daerah. Dorongan DPRD agar pemerintah menggali sumber Pendapatan Asli Daerah baru merupakan bagian dari strategi besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup warga. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bahwa pemerintah daerah harus selalu menjadikan anggaran sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan publik, bukan sekadar sebagai laporan administratif tahunan.

Tabel 2. Peran Pendidikan Kewarganegaraan

No.	Peran Pendidikan Kewarganegaraan	Interpretasi
1	Memperkuat Demokrasi Lokal	PKn menumbuhkan kesadaran bahwa DPRD adalah representasi rakyat, sehingga DPRD wajib memperjuangkan kepentingan publik dalam mendorong penggalan PAD baru.
2	Mendorong Akuntabilitas Pemerintahan	PKn memperkuat prinsip bahwa pemerintah harus bertanggung jawab, sehingga DPRD mengawasi kebijakan fiskal dan penggunaan PAD agar tidak terjadi penyimpangan.
3	Mengembangkan Kolaborasi Pemerintahan	PKn menekankan pentingnya sinergi legislatif–eksekutif, sehingga DPRD dan Pemkot bekerja sama menyusun APBD dan identifikasi potensi PAD baru.
4	Mendorong Inovasi Kebijakan Publik	PKn mengajarkan kreativitas dalam penyusunan kebijakan, sehingga pemerintah daerah terdorong mengembangkan sumber PAD inovatif seperti ekonomi kreatif dan digitalisasi retribusi.
5	Menguatkan Kemandirian Daerah	PKn membangun kesadaran tentang pentingnya otonomi fiskal, sehingga daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.
6	Meningkatkan Rasionalitas Kebijakan	PKn mengarahkan agar kebijakan berbasis data dan hasil kajian, sehingga Pemkot didorong melakukan

		benchmarking dan riset sebelum menetapkan sumber PAD baru.
7	Mengoptimalkan Pengelolaan Anggaran	PKn mengajarkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sehingga PAD baru diarahkan untuk meningkatkan belanja prioritas dan menghindari pemborosan.
8	Menjamin Pemenuhan Hak Layanan Publik	PKn menegaskan bahwa pelayanan publik adalah hak warga, sehingga peningkatan PAD harus diarahkan untuk memperbaiki layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
9	Memperkuat Transparansi Tata Kelola	PKn mewajibkan keterbukaan informasi, sehingga pemerintah harus transparan dalam penyusunan PAD baru dan penggunaan anggaran.
10	Mengarahkan Tanggung Jawab Pemerintah Lokal	PKn menekankan kewajiban pemerintah memenuhi kepentingan rakyat, sehingga PAD baru harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil.

Sumber: merdeka.com

Kesimpulan

Berdasarkan analisis Pendidikan Kewarganegaraan terhadap peran DPRD dalam mendorong Pemerintah Kota Tangerang menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, dapat disimpulkan bahwa peran legislatif sangat strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. DPRD telah menjalankan fungsi representasi rakyat, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dengan mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi fiskal melalui kajian, *benchmarking*, serta pengembangan potensi ekonomi baru. Dorongan tersebut sejalan dengan nilai-nilai fundamental Pendidikan Kewarganegaraan seperti akuntabilitas, transparansi, kolaborasi antar lembaga, kemandirian fiskal, dan pemenuhan hak layanan publik. Dengan penguatan PAD, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dasar, memperluas pembangunan, serta menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Secara keseluruhan, peran DPRD dalam agenda ini mencerminkan penerapan nilai kewarganegaraan yang ideal dalam praktik pemerintahan daerah.

Daftar Pustaka

- Azmi, S. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu pengejawantahan dimensi manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan makhluk religi. *Jurnal Likhitaprajna*, 18(1), 77–86. <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v18i1.30>
- Bachmid, F. (2020). Eksistensi kedaulatan rakyat dan implementasi parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 87–103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Budiutomo, T. W. (2013). Pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa. *Academy of Education Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.47200/aoej.v4i1.94>
- Dakhi, D. (2023). Analisis peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik bagi peserta didik. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(1), 421–427. <http://doi:10.51278/aj.v5i1.642>
- Efendi, I. (2020). Pendidikan kewarganegaraan: Wahana pengembangan kompetensi warganegara dalam pengenalan partisipasi politik siswa sekolah dasar. *Didaktika Taubidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(2), 149–162. <https://doi.org/10.30997/dt.v7i2.2635>
- Handoyo, E., & Lestari, P. (2017). *Pendidikan politik*. Pohon Cahaya.
- Hardian, M., Hidayah, Y., Suryaningsih, A., & Feriandi, Y. A. (2021). Gagasan pendidikan politik bagi generasi muda (sebuah kajian literatur). *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 6(3), 552. <https://doi.org/10.28926/briliant.v6i3.653>
- Juliardi, B. (2015). Implementasi pendidikan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2(2), 3.
- Juwandi, R., Nurwahid, Y., & Lestari, A. (2019). Media sosial sebagai sarana pendidikan politik untuk mengembangkan literasi digital warga negara. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* (Vol. 2, hlm. 369–378).
- Kharisma, D. (2015). Peran pendidikan politik terhadap partisipasi politik pemilih muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1144.
- Khatimah, H., Kartika, I. M., & Santika, I. G. N. (2022). Pengaruh implementasi pendidikan karakter terhadap sikap sosial pada siswa. *Widya Accarya*, 13(2), 127–132.

- Limilia, P., & Ariadne, E. (2018). Pengetahuan dan persepsi politik pada remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*, 16(1), 45–55.
- Merdeka.com. "DPRD Minta Pemkot Tangerang Tingkatkan PAD Kota Tangerang dari Sumber Baru untuk Layanan Prima" diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/dprd-minta-pemkot-tangerang-tingkatkan-pad-kota-tangerang-dari-sumber-baru-untuk-layanan-prima>
- Mulyani, S. D. (2022). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik siswa. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(2), 104–113.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Partisipasi politik masyarakat Sleman di masa pandemi Covid-19 dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.14994>
- Pemerintah Kota Tangerang, "*Sampaikan Raperda APBD 2026, Sachrudin Optimis Realisasikan Program Pembangunan*," Pemerintah Kota Tangerang, 16 Oktober 2025, <https://tangerangkota.go.id/berita/detail/56983/sampaikan-raperda-apbd-2026-sachrudin-optimis-realisasikan-program-pembangunan>
- Pemerintah Kota Tangerang, "*Sampaikan Raperda APBD 2026, Sachrudin Optimis Realisasikan Program Pembangunan*," Pemerintah Kota Tangerang, 16 Oktober 2025, <https://tangerangkota.go.id/berita/detail/56983/sampaikan-raperda-apbd-2026-sachrudin-optimis-realisasikan-program-pembangunan>. Kota Tangerang
- Pramusantri, S. B. (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan politik pemilih pemula*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://doi.org/10.7454/jps.2018.5>
- Rahman, A. (2018). Konsep dasar pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44–51. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8385>
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi dengan UUD 1945)*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika hasil perubahan UUD 1945 secara konseptual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N., & Konda, A. A. (2023). The theory of Pancasila elements as a reorientation of character education in Indonesia

- in building the spirit of nationalism. Dalam *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (hlm. 79–85).
- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun kualitas sistem politik demokrasi Indonesia melalui pemilu dalam perspektif integrasi bangsa dengan berorientasikan roh ideologi Pancasila. Dalam *Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan* (Vol. 1, No. 1, hlm. 74–85).
- Tamma, S. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan dan pembentukan preferensi politik awal pemilih pemula. *Jurnal Politik Profetik*, 9(1), 43–57. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i1a3>
- Tarigan, Paska Sriulina, Maretta Ulina Br Ginting, and Donald Vincensius Mario Siregar. 2025. “Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Bangsa Di Era Digital: Penelitian”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3 (4):1610-16. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.699>.
- Wulandari, N. A. R. T., & Dayati, U. (2020). Hubungan pengetahuan kewarganegaraan dengan partisipasi politik mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 361–367. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p361-367>